



Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gala Perkasa Widyatama¹, Diah Setyorini Gunawan², Suharno³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Magister Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

e-mail: gala.widyatama@mhs.unsoed.ac.id¹, diah.g@unsoed.ac.id², suharno@unsoed.ac.id³

Abstract: Fiscal decentralization is a delegation of authority from the central government to regional governments in managing regional finances. The balancing fund is one of the funds in the context of implementing fiscal decentralization and can be used for poverty alleviation. DI Yogyakarta Province is a region that has a high balance of funds, however DI Yogyakarta Province is the province that has the highest number of poor people on the island of Java. This research is quantitative research using panel data. Data was obtained from the central statistical agency of five districts/cities in DI Yogyakarta Province. The analysis method uses panel data regression for 2009-2022 in five districts/cities. The results of the analysis show that general allocation funds and special allocation funds have a negative and significant effect on the poverty level in DI Yogyakarta. Meanwhile, profit sharing funds and tourism have no effect on the poverty level in DI Yogyakarta.

Keywords: Poverty, DAU, DAK, DBH, Tourism

Abstrak: Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan cara mengatur keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. DI Yogyakarta merupakan daerah yang mendapatkan dana perimbangan yang tinggi, hal ini karena DI Yogyakarta adalah provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data panel. Data bersumber dari BPS lima kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dari 2009-2022 di lima kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta, sedangkan dana bagi hasil dan pariwisata tidak berdampak terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.

Kata Kunci: Kemiskinan, DAU, DAK, DBH, Pariwisata

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara. Pada *Sustainable Development Goal's* (SDG's) penekanan kemiskinan merupakan tujuan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi di semua negara dan harus diatasi. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yaitu dari sisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dengan adanya kebijakan fiskal ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan suatu negara.

Pelaksanaan pengaturan pendapatan dan pengeluaran terutama daerah dilakukan secara desentralisasi. Dimana desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi berlaku pada pengaturan pengeluaran dan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pengeluaran dan pendapatan daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan oleh pemerintah daerah seutuhnya. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah desentralisasi fiskal. Selain menggunakan aliran dana perimbangan dari pemerintah pusat, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendapatan asli daerah. Kemandirian fiskal suatu daerah menjadi unsur penting guna mendukung kegiatan perekonomian daerah dan dapat digunakan untuk mendukung pengentasan berbagai masalah sosial ekonomi termasuk masalah kemiskinan. Menurut Kementerian Keuangan (2023), pendapatan asli daerah diperoleh dengan pengoptimalan potensi daerah. Pariwisata menjadi salah satu potensi yang dimiliki dan menjadi sektor penting yang berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. Semakin berkembangnya sektor pariwisata akan mampu memperluas kesempatan tenaga kerja untuk bekerja sehingga mampu menekan angka kemiskinan (Sudiarta & Suardana, 2016; Zainuri et al., 2021).

Desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Dimana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penyelenggaraan pengeluaran dan pendapatan daerah diatur oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Desentralisasi fiskal memberikan peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin besar dalam menentukan perencanaan dan penganggaran (Khusaini, 2014). Adanya desentralisasi fiskal maka pengeluaran daerah akan efisien dan dapat mengentaskan kemiskinan di daerah. Penelitian Krishna & Shariff (2011) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di India dapat menekan kemiskinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 18 persen penduduk yang keluar dari kemiskinan setelah dilaksanakannya desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan program-program yang dapat menekan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih baik dengan adanya desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dalam jangka panjang (Roy et al., 2019). Selain dapat menekan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi penelitian Asfaw et al (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi angka kematian bayi di pedesaan India. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Masalah kemiskinan apabila tidak diatasi, maka akan terjebak pada suatu kondisi yang sering disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Menurut Ragnar Nurske, lingkaran setan kemiskinan (*The vicious circle of poverty*) menggambarkan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan dikarenakan karena tabungan masyarakat rendah, kemudian investasi yang rendah, adanya kekurangan modal, berdampak pada rendahnya produktifitas, dan pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya.

Keadaan kemiskinan suatu negara diukur dengan jumlah penduduk dengan konsumsi rata-rata yang di bawah garis kemiskinan. Biasanya kemiskinan diukur dengan jumlah penduduk atau persentase penduduk miskin. Untuk mengukur lebih jelas mengenai kemiskinan di Indonesia. Berikut merupakan gambar jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2019-2022:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia, Tahun 2017-2022

Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Dimana kemiskinan masih diatas 25 juta orang. Kemiskinan meningkat dari tahun 2019 dikarenakan oleh pandemi covid-19 dan mulai menurun pada tahun 2022. Kondisi kemiskinan ini dapat diatasi dengan berbagai cara salah satunya adalah desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menekan kemiskinan di daerah masing-masing. Penelitian Siburian, (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal Indonesia memberikan kontribusi terhadap hasil pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan dengan asas desentralisasi secara keseluruhan dapat menekan kemiskinan.

Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia juga tersebar di setiap pulauanya. Untuk melihat kondisi kemiskinan yang lebih jelas maka berikut merupakan kondisi kemiskinan di lima pulau besar di Indonesia:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Lima Pulau Besar di Indonesia, Tahun 2019-2022

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Jawa	12.555,90	14.752,02	14.023,52	13.106,92
Sumatera	4.767,52	5.851,53	5.862,66	5.763,42
Sulawesi	1.988,76	2.061,51	2.007,08	2.030,71
Papua	1.108,50	1.127,45	2.093,04	1.537,42
Kalimantan	961,52	1.016,10	975,41	995,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan mengenai kemiskinan dengan ukuran penduduk miskin. Kemiskinan tertinggi setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2020 yaitu pulau jawa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di pulau jawa lebih tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain. Padahal pulau jawa merupakan sentra pembangunan yang relatif lebih maju dibanding dengan pulau lain. Berikut merupakan kondisi kemiskinan perprovinsi di pulau jawa:

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2019-2022

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)							
	2019		2020		2021		2022	
	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2
DKI Jakarta	3.47	3.42	4.53	4.69	4.72	4.67	4.69	4.61
Jawa Barat	6.91	6.82	7.88	8.43	8.4	7.97	8.06	7.98
Jawa Tengah	10.8	10.58	11.41	11.84	11.79	11.25	10.93	10.98
DI. Yogyakarta	11.7	11.44	12.28	12.8	12.8	11.91	11.34	11.49
Jawa Timur	10.37	10.2	11.09	11.46	11.4	10.59	10.38	10.49
Banten	5.09	4.94	5.92	6.63	6.66	6.5	6.16	6.24

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 2. kondisi kemiskinan di pulau jawa yang terdiri dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan kemiskinan meningkat pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi adalah DI Yogyakarta. Dimana DI Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2020 selalu dalam kondisi kemiskinan tertinggi dibanding dengan provinsi lain.

Kemiskinan disetiap daerah memiliki kondisi berbeda-beda. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka daerah dapat mengatur keuangan secara komperhensif dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dana perimbangan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah (Manek & Badrudin, 2016)

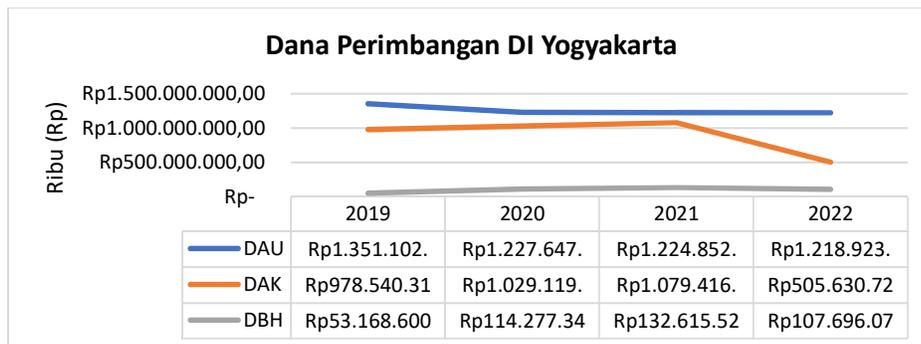
Dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang no 1 Tahun 2022 merupakan dana yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Penelitian Hamzah (2009) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa ketika DAU dinaikan maka kemiskinan akan turun. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari dana perimbangan ini dapat menekan kemiskinan.

DAU bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan salah satunya menurunkan tingkat kemiskinan (Ismail & Hakim, 2014). Dengan penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan Syahidin & Jalil (2020) DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten aceh tengah. Hal ini memberikan arti bahwa DAU memberikan kontribusi kepada pengentasan kemiskinan.

Selain DAU dana perimbangan juga terdapat DAK. Dimana semakin tinggi penerimaan DAK, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan khusus yang juga menjadi target nasional (Basyir & Syahnur, 2015). Ketika DAK yang dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain. Apabila program-program khusus dari tahun ke tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan tingkat Kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki kualitas hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar, (2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Selawesi Tengah. DAK dapat memberikan dampak kepada penurunan kemiskinan.

Dana perimbangan selain DAU dan DAK juga terdapat DBH. DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan tentunya dengan mengedepankan kepentingan public. DBH dapat menambah jumlah anggaran yang digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan peningkatan

program ekonomi di daerah (Isramiwarti et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Nany et al., (2022) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh secara parsial negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini memberikan arti bahwa DBH dapat mengentaskan kemiskinan. Berikut merupakan kondisi dana perimbangan di DI Yogyakarta:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. Dana Perimbangan Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan Gambar 2. Menunjukkan bahwa DAU merupakan urutan dana perimbangan tertinggi, disusul oleh DAK dan yang terendah adalah DBH. Dana perimbangan ini Dana Perimbangan membantu pemerintah untuk meningkatkan program dan realisasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang. Pengelolaan Dana Perimbangan yang optimal oleh pemerintah daerah tentu akan memberikan dampak positif bagi penurunan Tingkat Kemiskinan. Dana transfer ke daerah merupakan pendapatan bagi daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan tujuan salah satunya adalah menurunkan kemiskinan (Gumelar, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Manduapessy (2020) dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Nursini & Tawakkal, 2019) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara statistik signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa dana perimbangan di DI Yogyakarta relatif tinggi. Seharusnya hal ini akan memberikan dampak kepada penurunan kemiskinan di DI Yogyakarta. Namun pada kenyataannya DI Yogyakarta menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Selanjutnya dilihat dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber penerimaan PAD, berikut dibawah ini adalah jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023.



Sumber : Badan Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

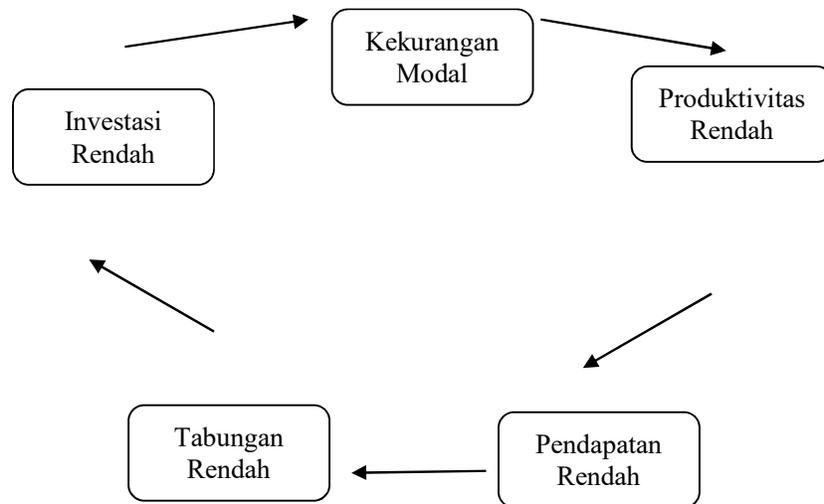
Gambar 3. Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan, 2023

Berdasarkan Gambar 3. diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 relatif mengalami peningkatan. Hal ini bergerak sebanding dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Semakin meningkat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah (Sanjoto et al., 2021). Hal ini karena para wisatawan yang datang *memberikan multiplier effect* terhadap masyarakat. Menurut Irhamna (2017) berkembangnya pariwisata mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari DAU, DAK, DBH, dan perkembangan pariwisata terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh setiap individu atau kelompok yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam suatu taraf hidup tertentu (Arsyad, 2010). Lingkaran kemiskinan merupakan teori yang mengatakan sebuah rangkaian kekuatan dengan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga suatu negara tetap miskin. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan lingkaran kemiskinan:



Gambar 3. Lingkaran Kemiskinan

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu gambaran atas pelimpahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui keadaan daerah masing-masing sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal diatur dalam UU no 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini menjelaskan bahwa guna mendukung pelaksanaan desentralisasi, diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah (TKD). Menurut Hastuti (2018) desentralisasi fiskal dilaksanakan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pariwisata

Menurut Wirawan et al., (2022) Pariwisata adalah perpindahan dari satu titik tertentu dan kembali lagi ke titik awal sehingga merupakan perjalanan yang berputar yang dimaksudkan untuk kegiatan rekreasi. Terdapat tiga unsur yang pariwisata, yaitu:

- a. Manusia sebagai pelaku pariwisata
- b. Tempat sebagai unsur fisik
- c. Waktu sebagai unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan pariwisata ditambah dengan lamanya waktu yang dihabiskan ditempat yang dikunjungi.

Menurut Utama (2014) dalam keilmuan pariwisata terdapat tiga syarat dasar yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Aspek ontologi dari ilmu pariwisata dapat dilihat kemampuannya dalam penyediaan informasi tentang perjalanan wisata, gejala pariwisata, karakteristik wisatawan dan lain-lain.
- b. Aspek epistemologi pariwisata yaitu ditunjukkan pada cara-cara pariwisata memperoleh kebenaran ilmiah.
- c. Aspek aksiologi pariwisata yaitu pariwisata memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Pariwisata dalam era otonomi daerah sektor yang potensial dan memberikan peranan penting untuk mendukung perekonomian daerah. Hal ini karena pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya terdapat isu strategis yang muncul terkait pariwisata di era otonomi daerah yaitu timbulnya persaingan antar daerah dan persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata (Ariani & Zulhawati, 2023). Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini akan meneliti dengan menggunakan angka sebagai analisis dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan angka sebagai bahan analisis dan menyajikan angka sebagai bahan pembahasan (Sugiono, 2012). Penelitian ini menggunakan data panel di Provinsi DI Yogyakarta yang terdiri dari 5

kabupaten dalam kurun waktu 2009-2022. Penelitian akan menggunakan regresi data panel.

Regresi Data Panel

Data panel merupakan data yang mengkombinasi data cross-section dan data time series (Gujarati, 2013). Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pariwisata terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Berikut merupakan model dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:	Y	=	Kemiskinan
	X _{1it}	=	Dana Alokasi Umum
	X _{2it}	=	Dana Alokasi Khusus
	X _{3it}	=	Dana Bagi Hasil
	Dit	=	Pariwisata
	β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄	=	Koefisien Regresi
	β ₀	=	Konstanta
	e	=	Error Term
	it	=	Cross Section dan Time Series

Pemilihan Model

a. Uji Chow

Uji Chow dalam regresi data panel digunakan untuk menentukan model yang terbaik diantara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Jika nilai prob cross-section chi-square lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain model yang terbaik adalah FEM begitu pula dengan sebaliknya

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan juga untuk menentukan model yang paling baik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Efek Model (REM). Uji ini didasarkan pada hipotesis.

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Kriteria dalam pengujian ini menggunakan nilai prob cross-section random dengan nilai 0,05. Apabila nilai prob kurang dari 0,05 maka H_1 ditolak dan dengan kata lain bahwa model yang terbaik menggunakan FEM. Begitu juga sebaliknya

c. Uji Lagrange Multiple

Uji ini digunakan untuk melihat model yang terbaik diantara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Pengujiannya didasarkan pada hipotesis sebagai berikut.

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

Kriteria yang dipergunakan yaitu melihat nilai p value cross section Breusch-pagan yang lebih kecil dari 0,05. Ketika nilai p value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling baik adalah REM, begitu pula sebaliknya.

Asumsi Klasik

Menurut Basuki & Yuliadi (2014) dalam data panel, pengujian asumsi klasik cukup menggunakan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hal ini karena data panel terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut dibawah ini adalah penjelasan mengenai pengujian multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

a. Multikolinieritas

Menurut Ghozali, (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Penelitian ini menggunakan uji korelasi. Dimana jika korelasi diatas $>0,09$ dapat dikatakan model terdapat gejala multikolinieritas.

b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual. Model regresi yang baik mempunyai varian yang sama atau homoskedastisitas. Salah satu cara mengetahui heteroskedastisitas adalah dengan metode glejser. Dimana metode ini menggunakan variable dependent dengan absolut dari residual. Nilai signifikansi menjadi suatu parameter jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Statistik

a. Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat variabel bebas pada penelitian ini secara serentak mampu menunjukkan perubahan nilai dari variabel terikat. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan F hitung dan F tabel pada penelitian ini dengan nilai signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) (Gujarati, 2013). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel DAU, DAK, DBH dan pariwisata terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_{ij} = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara DAU, DAK, DBH, dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan)

$H_1 : \beta_{ij} \neq 0$ (terdapat pengaruh secara bersama-sama antara DAU, DAK, DBH, dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan)

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependent. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai T_{hitung} dengan T_{tabel} dengan signifikansi 5 persen (0,05) dan derajat kebebasan (df).

Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_{ij} \geq 0$ (masing-masing variabel bebas yaitu DAU, DAK, DBH dan Pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan)

$H_1 : \beta_{ij} < 0$ (masing-masing variabel bebas yaitu DAU, DAK, DBH dan Pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan)

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted* R^2) yang mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Dapat dikatakan bahwa apabila nilai *adjusted* R^2 mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependent dan sebaliknya jika nilai *adjusted* R^2 mendekati 0 maka semakin buruk kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependent.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Uji Pemilihan Model

1) Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih CEM dan FEM.

Berikut merupakan table hasil uji chow:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	467,974785	(4,61)	0,0000
Cross-section Chi-square	241,913171	4	0,0000

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai probability $<0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model FEM.

2) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih CEM dan FEM. Berikut merupakan table hasil uji chow:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1871,899141	4	0.0000

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai probability $<0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model FEM.

b. Asumsi Klasik

1) Uji Multikolienaritas

Berdasarkan hasil analisis berikut merupakan table yang menunjukkan uji multikol:

Tabel 5. Uji Multikolienaritas

	LN_DBH	LN_DAU	LN_DAK	LN_PAR
LN_DBH	1.000000	-0.141548	-0.185373	0.173027
LN_DAU	-0.141548	1.000000	0.586145	0.356047
LN_DAK	-0.185373	0.586145	1.000000	-0.073890
LN_PAR	0.173027	0.356047	-0.073890	1.000000

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 5. Menunjukkan bahwa korelasi setiap variabel tidak melebihi 0,09. Hal ini memberikan arti bahwa multikolienaritas dapat ditoleransi.

2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji gletjer. Berikut merupakan Tabel yang menunjukkan hasil uji gletjer:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46.63258	91.98349	0.506967	0.6140
LN_DBH	-2.637825	1.439869	-1.831990	0.0718
LN_DAU	1.700681	2.910795	0.584267	0.5612
LN_DAK	-0.222060	0.440111	-0.504554	0.6157
LN_PAR	-1.249210	0.697295	-1.791508	0.0782

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6. hasil analisis menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik pada uji glejser secara keseluruhan berada pada $>0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas dapat ditoleransi.

c. Hasil Regresi Data Panel

Berikut merupakan hasil analisis regresi data panel dengan memilih FEM:

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	740,1471	187,6123	3,945088	0,0002
LN_DBH	-0,030807	2,936801	-0,010490	0,9917
LN_DAU	-19,93645	5,936947	-3,358031	0,0014
LN_DAK	-3,578991	0,897663	-3,987009	0,0002
LN_PAR	-0,124700	1,422225	-0,087679	0,9304

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,977956	Mean dependent var	102,8459
Adjusted R-squared	0,975065	S.D. dependent var	42,67776
S.E. of regression	6,739156	Akaike info criterion	6,773268
Sum squared resid	2770,390	Schwarz criterion	7,062360
Log likelihood	-228,0644	Hannan-Quinn criter.	6,888099
F-statistic	338,2755	Durbin-Watson stat	1,067296
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7. berikut merupakan model regresi pada penelitian ini:

$$Y = 740,147 - 0,0308 DBH_{it} - 19,9364DAU_{it} - 3,5789 DAK_{it} - 0,1247Pariwisata_{it} + e_{it}$$

Berikut merupakan arti dari setiap koefisien:

1. Koefisien β_1 adalah 740,147 memiliki arti bahwa jika DBH, DAU, DAK, dan Pariwisata nol maka kemiskinan 740.147 orang.
2. DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
3. Koefisien β_3 adalah -19,936 memiliki arti bahwa jika DAU naik 1 persen maka kemiskinan akan turun 19.936 orang di Provinsi DI Yogyakarta.
4. Koefisien β_4 adalah -3,578 memiliki arti bahwa jika DAK naik 1 persen maka kemiskinan akan turun 3.578 orang di Provinsi DI Yogyakarta.

Pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

d. Uji F

Uji F merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dari variabel independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan Tabel 7. Menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada f-statistik adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel DAU, DAK, DBH dan Pariwisata berepengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

e. Uji t

Uji t merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut merupakan table yang menunjukkan uji t:

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	740,1471	187,6123	3,945088	0,0002
LN_DBH	-0,030807	2,936801	-0,010490	0,9917
LN_DAU	-19,93645	5,936947	-3,358031	0,0014
LN_DAK	-3,578991	0,897663	-3,987009	0,0002
LN_PAR	-0,124700	1,422225	-0,087679	0,9304

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berikut merupakan interpretasi dari setiap variabel:

1. DBH memiliki probabilitas 0,9917 dimana nilai ini $>0,05$. Maka dapat dikatakan DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.
2. DAU memiliki probabilitas 0,0014 dan koefisien -19,9364 dimana nilai probabilitas $< 0,05$. Maka dapat dikatakan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
3. DAK memiliki probabilitas 0,0002 dan koefisien -3,578 dimana nilai probabilitas $< 0,05$. Maka dapat dikatakan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
4. Pariwisata memiliki probabilitas 0,9304 dimana nilai ini $>0,05$. Maka dapat dikatakan Pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta

f. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dianalisis dengan Adjusted R-Square. Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Square 0,975. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan Pariwisata dapat menjelaskan kepada variabel kemiskinan sebesar 0,975 atau 97,5 persen. Sisanya 2,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Pembahasan

a. Pengaruh Dbh Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta

Dana bagi hasil merupakan salah satu dari dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu et al., (2019) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado.

DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan oleh pelaksanaan penggunaan DBH tidak leluasa. DBH memberikan ketidakpastian keuangan kepada daerah dikarenakan dalam perkiraan realisasi ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemumut pajak. Hal ini memberikan ketidakleluasaan dalam menggunakan DBH. Dapat dikatakan bahwa pengalokasian DBH kurang berdampak kepada penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah seharusnya memiliki alokasi pengaturan pengeluaran yang berdampak secara inklusif kepada masyarakat layaknya pada penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. Perkembangan otonomi daerah khususnya pada desentralisasi fiskal pada tahun 2022 sudah mengalami perbaikan dengan disahkannya Undang-undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 151 menunjukkan bahwa aparatur pengelolaan keuangan daerah harus memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah dengan tujuan untuk penyelenggaraan pengeluaran yang efektif dan efisien. Tentunya dengan adanya perbaikan ini diharapkan pemerintah daerah DIY dapat mengalokasikan dana transfer ke daerah untuk mengatasi kemiskinan mengingat DIY merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa.

b. Pengaruh Dau Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta

Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien beta DAU adalah koefisien -19,9364 dan nilai probabilitas 0,0014. Hal ini

menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahidin & Jalil. M, (2020) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amami & Asmara, (2022) menunjukkan hal yang sama bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAU sudah memiliki dampak kepada penurunan kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Penggunaan DAU yang dialokasikan kepada pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum berdampak kepada penurunan kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

c. Pengaruh Dak Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta

Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan dana yang penggunaannya dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa nilai koefisien DAK adalah -3,578 dan nilai probabilitas 0,0002. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar, (2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Selawesi Tengah. DAK memberikan pengaruh negatif artinya ketika DAK dinaikan maka kemiskinan akan turun. DAK merupakan dana yang digunakan untuk membiayai sarana fisik dan sarana non fisik. Sarana dan prasarana dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga akan memberikan akses dalam peningkatan pendapatan. Dengan kemudahan dalam akses tersebut maka akan mendorong kegiatan produksi lalu terjadi peningkatan pendapatan sehingga akan menekan tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

d. Pengaruh Pariwisata Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan oleh Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi DI Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang seharusnya dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian sekitar. Hasil analisis

menunjukkan bahwa nilai koefisien beta pada variabel pariwisata adalah $-0,124$ dengan nilai probabilitas $0,9304$. Arah koefisien beta sudah menunjukkan pengaruh negatif namun secara statistik menunjukkan bahwa probabilitas $< 0,05$. Sehingga pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rewah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Pariwisata seharusnya dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Namun berdasarkan hasil analisis sektor pariwisata DI Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di DI Yogyakarta belum dapat menyerap tenaga kerja secara massif. Terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Aktaniensia & Hayati, (2023) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah wisatawan naik maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Kondisi seperti ini akan memberikan dampak kepada penurunan tingkat pendapatan pada tenaga kerja yang ada di DI Yogyakarta. Tentu dengan turunnya tingkat pendapatan ini akan menyebabkan kondisi kemiskinan yang semakin parah. Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah harus melakukan intervensi pada pembenahan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata seharusnya dapat menekan tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa:

Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta; Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.; Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta; Pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Implikasi pada penelitian ini adalah perlunya pengoptimalan dana bagi hasil dan pengembangan potensi pariwisata sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktaniensia, N. A., & Hayati, J. (2023). Pengaruh sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007–2019. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(1), 139. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.17082>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Ariani, M., & Zulhawati. (2023). *Manajemen destinasi pariwisata* (Efitra, Ed.; Cetak Pert.). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asfaw, A., Frohberg, R., James, K., & Jutting, J. (2007). Fiscal decentralization and infant mortality: Empirical evidence from rural India. *Journal of Developing Areas*, 41(1), 17–35.
- Aziz Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Elektronik data processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Danisa Media.
- Basyir, H., & Syahnur, S. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 59–66.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2013). *Ekonometrika dasar*. Erlangga.
- Gumelar, A. (2021). Analisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus: Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(2), 342–364.
- Hamzah, A. (2009). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: Pendekatan analisis jalur: Studi pada 38 kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur periode 2001–2006. *Jurnal Balitbang Depdagri*, 9(3), 156–176.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Irhamna, S. A. (2017). Dampak pengembangan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar objek wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo. *Economics Development Analysis Journal*, 6(3), 320–327.
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Aplikasi Bisnis*, 9(15), 173–175.

- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan dengan belanja daerah sebagai intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011 s.d 2015. *Variabel, Pekbis Jurnal*, 3(9), 195–199.
- Khusaini, M. (2014). Local government planning and budgeting process: A case of districts and cities in Indonesia. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.063190>
- Krishna, A., & Shariff, A. (2011). The irrelevance of national strategies? Rural poverty dynamics in states and regions of India, 1993–2005. *World Development*, 39(4), 33–49.
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 17(2), 27–36.
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4, 39–57.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & others. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 247–261. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274>
- Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(1), 270–285. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16>
- Rasu, K. J., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2019). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Rewah, D. N., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis dampak pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 100–116.
- Roy, J., Lestari, D., & Busari, A. (2019). Measuring the impact of fiscal decentralization on economic growth and income inequality using the heuristic network. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5), 1016–1024. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1144.0585C19>
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty—Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493.

- Sudiarta, I. N., & Suardana, I. W. (2016). Dampak pariwisata terhadap kemiskinan di kawasan pariwisata di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 209–227.
- Syahidin, & Jalil, A. (2020). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15.
- Syahidin, S., & Jalil, M. A. (2020). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Utama, I. G. B. R. (2014). *Pengantar industri pariwisata: Tantangan dan peluang bisnis kreatif* (1st ed.). Deepublish.
- Wirawan, P. E., Octaviany, V., & Nuruddin. (2022). *Pengantar pariwisata*. Nilacakra.
- Zainuri, Priyono, T. H., & Varazizah, A. (2021). Dampak pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(2), 138–144. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i2.26771>